

BIBLIOGRAPHY

A. Literature

Arafat, Yasir, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya, Permata Press.

Cavadino, Michael & James Dignan, 1992, *the Penal System*. Sage Pubns.

Dahlan dan Sanusi Bintang, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Sevent Edition. West Publishing Co.

Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.

Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta.

Lontoh, Rudhy, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Mertokusomo, Sudikno, 2000, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Mulyadi, Kartini, 2000, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Makalah, Jakarta.
- _____, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paton, 1969, *A Textbook of jurisprudence*, Oxford University Press, London.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangungson, 1999, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Grasindo, Jakarta.
- Setiawan, 2003, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor Atau Lebih*, dalam Inservice Training Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Puskdiklat Mahkamah Agung RI, MA RI, Jakarta.
- _____, 2001, *Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, dalam Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2005, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryana, Daniel, 2007, *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Surya, Bandung.
- Syahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Tim Bidang Pelatihan dan Hukum Mahkamah Agung RI, 2003, *Inservice Training Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*, MA RI, Jakarta.
- Tim Penyusun, *Panduan Penelitian Disertasi Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tumbuan, Fred B.G, 2007, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh PERPU No. 1/1998*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dalam Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Surya, Bandung.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 2003, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuhassarie, Emmy ed., 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

B. Acts

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

C. Jurisprudence

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 757 K/Pdt.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 PK/Pdt.Sus-pailit/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 202 PK/Pdt.Sus/2012.

Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 01/Pdt/Kepailitan/1990/PN.Pbg.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 17/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PKPU2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 883/Pid.B/2017/ PN.JKT.TIM.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1047/Pid.Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel.

D. Journal

Eberle, Edward J., January 2009, *the Method and Role of Comparative Law*, Volume 8 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 451.

Fakultas Hukum Universitas Lampung, “*Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit oleh Balai Harta Peninggalan Akibat Hukumnya*”, Jurnal Ilmu Hukum “Fiat Justisia,” Volume 5 Nomor 1 Januari-April 2011.

Nurudin, Agus, April 2014, *Menyoal tentang Honorarium Kurator/Pengurus Boedel Pailit dalam Pelaksanaan Kepailitan*, Jurnal Spektrum Volume 11/Nomor I/April 2014.

E. Thesis

Astiti, Sriti Hesti, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Mukri, 2016, *Penyitaan dan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dinyatakan Pailit*, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

F. Internet

Apul, Yan, 29 November 2016, *Permasalahan terhadap Kendala Efektifitas Undang-Undang Kepailitan dan Pemecahannya dari Sudut Pandang Kurator*, Prosiding Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI, diakses dari <https://www.scribd.com>

_____, 1 Desember 2017, *Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/> prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit

_____, 28 November 2016, *5 Hal yang Perlu Diketahui Kurator Soal Hakim Pengawas*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5768fb81155aa/5-hal-yang-perlu-diketahui-kurator-soal-hakim-pengawas>

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 19 November 201, *Tentang AKPI*, diakses dari <http://www.akpi.or.id/>

- Heriani, Fitri N, 29 November 2016, *Kurator Bersuara tentang Aturan Baru Imbalan Jasa*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c8e4a71870b/kurator-bersuara-tentang-aturan-baru-imbalan-jasa>
- Hiariej, Eddy O.S., 22 Maret 2017, *Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana*, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>
- Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, 27 November 2016, *Kode Etik Profesi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia*, diakses dari <http://ikapi-kurator.org>
- NN, 19 November 2016, *Organisasi Kurator Diminta Bersatu Untuk Standarisasi Pendidikan Dan Ujian Profesi, Sudah Ada Payung Hukum Komite Bersama*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54f3d2ff21e2d/organisasi-kurator-diminta-bersatu>
- NN, 29 November 2016, *U.S. Bankruptcy Code*, diakses dari <http://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy>
- Simanjuntak, Rio T, 29 November 2016, *Kriminalisasi Kurator, Langkah Mundur Hukum Kepailitan di Indonesia*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53686a2becde7/kriminalisasi-kurator--langkah-mundur-hukum-kepailitan-di-indonesia-broleh--rio-t-simanjuntak-sh->
- Stephany, Happy R, 18 November 2016, *Kisah Kontroversial Permen Fee Kurator*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e232cf06594/kisah-kontroversial-permen-ifee-i-kurator>
- Sulaiman, Alfin, 29 November 2016, *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->
- Walukow, Julita Melissa, 20 November 2018, “*Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141150&val=5801>.